

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang sempurna karena mampu mengatur dan mengatur perilakunya sendiri, mengarahkan dirinya ke arah tujuan yang konstruktif, dan memilih nasibnya sendiri. Setiap orang memiliki kapasitas untuk berpikir, merasakan, berkehendak, dan bertindak (kognisi, kemelekatan, konasi, tindakan). Setiap orang memiliki bakat tertentu yang mempengaruhi kualitas hidupnya dalam bentuk informasi, kemampuan, dan sikap. Orang yang dapat terlibat dengan lingkungannya dan memiliki kondisi mental yang baik adalah orang yang kompeten secara sosial. Menurut Michael Krik Patricks (2016) dari keperawatan kesehatan jiwa, mengatakan bahwa orang yang sehat jiwanya adalah orang yang bebas dari segala gangguan psikis, dan dapat berfungsi sesuai apa yang ada padanya. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI mengatakan bahwa penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi masyarakat.

UU Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Yazminedi (2018)

mengungkapkan bahwa Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko yang tinggi mengalami gangguan kejiwaan.

Menurut informasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang dikutip Iyus Yosep, masalah kesehatan jiwa telah menjadi masalah serius di seluruh dunia. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang di dunia menderita gangguan jiwa, yang setara dengan 450 juta orang.

Penyandang disabilitas mental merupakan salah satu isu PPKS untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas mental, mereka membutuhkan bantuan dan rehabilitasi dari pemerintah. Kesejahteraan sosial diperlukan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan baik dan berkembang untuk memenuhi tugas sosialnya. Siapa pun yang telah sembuh dari gangguan jiwa tetapi masih tidak dapat melakukan aktivitas sosial normal dianggap mengalami keterbelakangan mental. Karena itu, mereka membutuhkan perawatan untuk mengurangi kekambuhan dan membantu mereka berfungsi secara sosial kembali. Perhatian terhadap disabilitas mental diperlukan karena mereka yang mengalami kemajuan selama rehabilitasi di panti sosial memiliki kemungkinan besar untuk kembali ke kondisi tersebut. Perencanaan rehabilitasi membantu dalam proses keluar dengan menarik perhatian pekerja sosial dan lembaga ke disabilitas intelektual. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Tanggung jawab pemerintah untuk mengarahkan, mendorong,

melindungi, dan menciptakan lingkungan yang mendorong partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dalam bentuk pelayanan sosial, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sebagai aturan, masalah ini meningkat setiap tahun.. Terbukti angka penderita gangguan jiwa di Jawa Barat sebanyak 16.714 orang ditahun 2019.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung adalah salah satu tempat di mana fungsi sosial penyandang disabilitas mental dapat dipulihkan melalui konseling rehabilitasi agar klien dapat merasakan kembali keberfungsian sosialnya dengan baik. Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bandung merupakan salah satu tempat mengembalikan fungsi sosial gangguan jiwa dengan bantuan bimbingan rehabilitasi agar klien dapat kembali dan menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Dari data yang ada, jumlah penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Bandung ada sebanyak 27 orang. UPTD Dinas Sosial Kota Bandung memiliki Pekerja Sosial yang mampu mengeksekusi dan memaksimalkan apa yang tersedia bagi mereka sebagai pengasuh dan fasilitator sehingga mereka dapat terus membimbing klien penyandang disabilitas mental dengan memaksimalkan keterampilan mereka dari pelatihan yang mereka terima dari lembaga. Agar klien gangguan jiwa dapat memanfaatkan fungsi sosialnya dengan baik di masyarakat atau kembalinya ke keluarga dan masyarakatnya, maka

pekerja sosial harus melaksanakan tugas dan usahanya sendiri. Tugas pekerja sosial adalah memecahkan masalah kehidupan dan perilaku individu, seperti masalah psikologis. Masalah mental mengubah kepribadiannya.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

No	Judul Penelitian Terdahulu	Penjelasan Penelitian
1.	Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Kepada orang Dengan Disabilitas Mental di Pantti Sosial Bina Laras Sukabumi 2015	didalamnya menjelaskan bahwasanya orang dengan gangguan jiwa mental ringan adalah seseorang yang memiliki gangguan mental atau perilaku karena penyakit mental sebelumnya yang mencegahnya melakukan tugas sehari-hari atau sosialnya. Alasan utamanya adalah tidak berfungsinya satu atau lebih bagian sistem saraf pusat (SSP), yang mungkin diakibatkan oleh penyakit, kecelakaan, atau keturunan.
2.	Model Penanganan dan Pelayanan Mental ringan di Rumah Pelayanan Sosial Mental ringan Martani Cilacap 2017	Mendeskripsikan tentang pengobatan dan perawatan gangguan jiwa ringan di Rumah Dinas Sosial Martani Cilacap kemudian memberikan gambaran tentang model pengobatan dan

		perawatan gangguan jiwa ringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengajuan dan pemberian pelayanan kesehatan jiwa ringan, serta menemukan model proses tersebut di Panti Sosial Penyakit Jiwa Ringan Martani Cilacap.
3.	Intervensi Pekerja Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Mental di Margo Laras Pati 2019	mendeskripsikan intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap penyandang disabilitas di PSRSPDM Margo Laras Pati serta faktor pendukung dan penghambatnya.
4.	Model Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh Cibabat Cimahi 2018	bertujuan untuk mengetahui fungsi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di UPTD Panti sosial rehabilitasi penyandang disabilitas cibabat cimahi, untuk mengetahui pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan untuk mengetahui perubahan perilaku penyandang disabilitas setelah menerima program pelayanan di UPTD Panti sosial penyandang disabilitas cibabat cimahi.

5.	Pembinaan Spiritual Penyandang Disabilitas Mental di Balai Rehabilitasi Sosial Dharma Guna Bengkulu 2020	penelitian ini menjelaskan kondisi spiritualitas penerima manfaat, upaya pembina spiritual dalam membina penerima manfaat, dan untuk mengetahui efektifitas pembinaan spiritual terhadap kondisi spiritual penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) Bengkulu.
6.	Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pada Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Sosial Bina Laras Pabelum	membahas tentang peran pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas mental di Panti Sosial Bina Laras Pabelum. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelayanan, program, dan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan di PSBL Pabelum.
7.	Manajemen Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial	Kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan rehabilitasi sosial di BRSPDM Margot Laras Pati berjalan

	<p>Penyandang Disabilitas Mental “Margo Laras” Pati</p>	<p>cukup baik dalam mengembalikan fungsi sosial para penerima manfaat dengan menawarkan berbagai program kepada mereka. Perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pembinaan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran adalah semua elemen manajemen yang berkelanjutan. tentang kendala pelayanan seperti penerima manfaat yang tidak kooperatif, penolakan keluarga PM, dan stigma masyarakat. Kerjasama tim yang baik, sarana dan prasarana yang memadai mendukung pelayanan.</p>
8.	<p>Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Kepada Orang Dengan Disabilitas Mental Eks Psikotik Di Panti Sosial Bina Laras “Phala Martha” Sukabumi</p>	<p>Phala Martha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut kepada orang dengan disabilitas mental eks psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan</p>

		penyiapan standar pelayanan serta pemberian informasi dan rujukan
9.	Proses Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental (Studi di Panti Asuhan St. Theresia Desa Mojorejo Kec. Wates, Kab. Blitar)	Menjelaskan mengenai proses pelayanan sosial kepada kaum disabilitas mental yang ada di Panti Asuhan St. Theresia.
10.	Metode Bimbingan Mental Dalam Pembentukan Budi Pekerti Tuna Netra di UPTD Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lampung.	penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan metode bimbingan mental dalam pembentukan budi pekerti tuna netra serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan metode bimbingan mental dalam pembentukan budi pekerti tuna netra.

Dari beberapa penelitian, saya tertarik untuk meneliti tentang “ Rehabilitasi Sosial Dasar Dalam Memulihkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas mental Di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung “. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan proses rehabilitasi sosial dasar bagi klien penyandang disabilitas mental dalam memulihkan keberfungsian sosialnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang

berguna bagi pengembangan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan rehabilitasi sosial dasar dalam memulihkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas mental di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung?
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tahapan rehabilitasi sosial dasar untuk memulihkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas mental di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung?
3. Implikasi teoritis dan praktis pekerja sosial di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai: “Rehabilitasi Sosial Dasar Dalam Memulihkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Mental Di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas mental.

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pendukung dan penghambat dalam rehabilitasi sosial klien disabilitas mental di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung.
3. Mendeskripsikan Implikasi pekerja sosial dalam Rehabilitasi Sosial Dasar Dalam Memulihkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Mental di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang rehabilitasi sosial dasar dalam memulihkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas eks psikotik di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah penjelasan tentang kegunaan penelitian tersebut dalam kedua aspek tersebut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang rehabilitasi sosial, khususnya pada penyandang disabilitas mental. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang tersebut dalam mengembangkan teori dan memperluas pemahaman tentang rehabilitasi sosial.
 - b. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial penyandang disabilitas eks psikotik. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh individu tersebut dan menyediakan dasar pengetahuan untuk merancang intervensi yang lebih efektif.

2. Manfaat Praktis

- a. Panduan intervensi: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para praktisi dan pihak terkait di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung dalam merancang program rehabilitasi sosial dasar yang sesuai untuk penyandang disabilitas eks psikotik. Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi strategi dan teknik yang efektif dalam meningkatkan keberfungsian sosial individu tersebut.
- b. Perbaikan layanan: Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang kekurangan atau kelemahan dalam layanan rehabilitasi sosial yang saat ini ada di UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung. Hal ini dapat mendorong perbaikan layanan, termasuk pengembangan program yang lebih holistik, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kualitas perawatan bagi penyandang disabilitas eks psikotik.
- c. Pemberdayaan individu: Penelitian ini dapat membantu individu penyandang disabilitas eks psikotik dalam pemulihan dan pemberdayaan diri. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian sosial mereka, intervensi yang tepat dapat diberikan untuk membantu mereka berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, meningkatkan kemandirian, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.